



AKTIVASI PBI JKN

Pasien Cuci Darah & Kanker Didahulukan

UMBULHARJO—Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Jogja memprioritaskan pengaktifan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dinonaktifkan, terutama bagi warga dengan kondisi darurat seperti pasien cuci darah dan kemoterapi kanker.

Kepala Dinkes Kota Jogja, Emma Rahmi Aryani, mengungkapkan jajarannya menerima informasi pada awal bulan ini ada sekitar 21.000 peserta PBI JKN yang dibiayai APBN dinonaktifkan. Kondisi ini baru diketahui warga saat hendak menggunakan layanan-kesehatan di rumah sakit. "Peserta baru tahu saat datang ke rumah sakit dan statusnya tidak aktif," ujarnya saat jumpa pers di Balai Kota Jogja, Jumat (6/2).

Setelah menerima laporan, Dinkes bersama pengelola Jamkesda berupaya mengaktifkan kembali peserta yang memenuhi kriteria untuk dibiayai melalui APBD Kota Jogja. Skema ini mencakup warga Kota Jogja yang didaftarkan pemerintah daerah pada kepesertaan BPJS kelas 3, dengan syarat bukan pekerja formal.

"Bagi warga Kota Jogja yang mau didaftarkan BPJS kelas 3 akan dikaver Pemkot dengan syarat mereka bukan pekerja, misalnya ibu rumah tangga," katanya.

Namun, proses pengaktifan menghadapi keterbatasan sumber daya. Petugas Jamkesda hanya berjumlah tujuh orang sehingga sempat kewalahan saat terjadi lonjakan warga yang datang mencapai 350 orang per hari.

Dinkes kemudian menetapkan kebijakan prioritas bagi warga yang membutuhkan

layanan medis mendesak, seperti pasien cuci darah dan kemoterapi, agar kepesertaannya segera diproses.

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinkes Kota Jogja, Waryono, menyampaikan jajarannya bergerak cepat dengan berkoordinasi langsung dengan BPJS Kesehatan agar proses pengaktifan bisa dipercepat.

"Kami juga diberi keleluasaan tambahan akun sehingga prosesnya bisa lebih cepat," kata Waryono.

Ia menjelaskan, pengajuan pengaktifan dapat dilakukan melalui *Jogja Smart Service* (JSS), *WhatsApp* Jamkesda, maupun datang langsung ke Mal Pelayanan Publik (MPP), meski kunjungan langsung kini dibatasi kuota.

"Hari ini [Jumat] kami beri kuota 50 orang di MPP. Prioritas tetap untuk pasien hemodialisa dan kemoterapi karena kalau tidak dilakukan sesuai jadwal bisa membahayakan," katanya.

Berdasarkan nota kesepahaman antara Wali Kota Jogja dan BPJS Kesehatan, pengaktifan kepesertaan dalam skema *Universal Health Coverage* (UHC) bisa dilakukan dalam waktu satu jam setelah pendaftaran.

Saat ini, Pemkot Jogja membiayai 90.231 peserta BPJS melalui APBD sejak Januari 2026. Jika seluruh peserta PBI JKN yang dinonaktifkan dialihkan ke APBD, jumlahnya diperkirakan meningkat menjadi sekitar 95.000 orang, meski bersifat fluktuatif karena adanya peserta yang meninggal dunia atau berubah status. "Intinya kami tetap berupaya mengaktifasi ulang bagi PBI JKN yang memang bisa dibiayai oleh APBD Kota Jogja," katanya. (Ariq Fajar Hidayat)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 29 Mei 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005